



Program Sekolah Gratis

BOS Daerah Turun Februari

UMBULHARJO -- Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tengah berjuang agar Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari APBD Kota Yogyakarta bisa dicairkan sekolah pada pertengahan Februari mendatang. Selanjutnya, anggaran untuk operasional SD dan SMP Negeri di Jogja yang disebut BOS Daerah itu akan dicairkan setiap bulan.

Seperti diketahui, Pemkot menerapkan kebijakan sekolah gratis bagi SD dan SMP Negeri di Jogja mulai tahun ini. SD dan SMP Negeri tidak boleh lagi menarik iuran dari siswa untuk operasional sekolah. Sebagai gantinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan BOS Daerah kepada sekolah untuk menutupi kekurangan BOS dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Syamsuri MM di Aula Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Selasa (20/1), mengatakan, kegiatan belajar mengajar (KBM) masih bisa berjalan lancar apabila keterlambatan pencairan BOS hanya sekitar 1 bulan.

Yogyakarta, 20/1 -- "Tapi kalau sampai 3-4 bulan, KBM bisa terganggu. Nah, kita ingin jangan sampai KBM vakum gara-gara turunya BOS ke sekolah terlambat," tegasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Budi Asrori menyampaikan, se-

kolah juga harus bekerja keras menyusun daftar kebutuhan yang akan digunakan untuk pencairan BOS Daerah. APBS juga perlu direvisi, terutama pada pos pendapatan. Sebab terdapat perubahan sumber pendapatan untuk 6 bulan ke depan yang semula komite sekolah menjadi pemerintah.

Tentang kepastian tidak adanya pungutan lagi, Budi menyatakan Dinas Pendidikan belum bisa memastikan, karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) BOS dari pemerintah pusat. Untuk saat ini, sekolah dilarang menarik iuran dari siswa.

"Selain itu, kalau bisa pencairan BOS akan dilakukan secara rutin setiap bulan. Sebab BOS Daerah itu untuk mengganti sumber pendapatan dari komite sekolah yang cashflow-nya perbulan," terangnya.

Ditambahkan, SPP yang sudah telanjur dibayarkan untuk 12 bulan, harus dikembalikan separonya (6 bulan). Sedangkan iuran dengan peruntukan di luar operasional sekolah yang telanjur dibayarkan pada tahun lalu, dipersilakan untuk dirembug sekolah, komite sekolah, dan orangtua siswa.

Berkaitan dengan kebijakan sekolah gratis di SD dan SMP Negeri, Syamsuri memaparkan,

Pemkot menerbitkan Peraturan Walikota No 6 tahun 2009 tentang BOS Daerah. BOS SD Rp 650.000, berasal dari APBN Rp 400.000 dan APBD Rp 250.000. BOS SMP Rp 1,2 juta, berasal dari APBN Rp 575.000 dan APBD Rp 625.000.

Sedangkan untuk SMA dan SMK Negeri, Pemkot memberikan bantuan biaya registrasi dan herregistrasi. Sehingga siswa bebas dari pungutan registrasi dan herregistrasi. Untuk SMA, registrasi Rp 400.000 dan herregistrasi Rp 600.000. Untuk SMK, registrasi Rp 500.000 dan herregistrasi Rp 700.000.

Siswa SMA dan SMK Negeri dari keluarga miskin pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) bebas dari segala macam pungutan. Biaya pendidikan mereka ditanggung APBD Jogja melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD).

Pemkot membutuhkan dana Rp 35,75 miliar untuk melaksanakan seluruh program tersebut, terdiri dari anggaran JPD Rp 15 miliar, BOS Daerah Rp 14,75 miliar, serta registrasi dan herregistrasi Rp 6 miliar. Dari jumlah itu, Pemkot baru menganggarkan Rp 28,7 miliar. BOS Daerah yang membutuhkan Rp 14,75 miliar, baru dianggarkan Rp 7 miliar. Kekurangan tengah diminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY. (fir)

SI NIN AY BDDTA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005